

DESA BENGKALA DAN PEMENUHAN HAK POLITIK DALAM PEMILU

(Studi Kasus Kaum Disabilitas Desa Bengkala Dalam Pemilukada 2017)

Riko Firman Andika¹⁾, Piers Andreas Noak²⁾, Bandiyah³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: rikofirmanandika@gmail.com¹⁾, andreas.noak@yahoo.com²⁾, dyah_3981@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

Persons with disabilities (PwDs) in Indonesia are still discriminated, especially on election day. Persons with disabilities in elections have not been fully considered. However, Bengkala Village, Buleleng, Bali Province is able to improve and fulfill the political rights for PwDs. Bengkala Village as a best practice for the needs of PwDs and success as an inclusive Election organizer. This research uses descriptive qualitative method with purposive sampling technique. In seeing the success of Bengkala Village to fulfill the political rights of disability is by using three theories namely: participation theory, rational choice theory, and dramaturgy theory. The three theories dissect disability community relationships with the fulfillment of political rights in elections in Bengkala Village. The purpose of this study is to find out how Bengkala village can fulfill the political rights of the disability. The findings of this research are, firstly, Bengkala Village meets as inclusive village for people with disability, this is inseparable from a Putu Kanta volunteer who supports the existence of people persons with disabilities. Secondly, although there are problems from the KPU, but people with disabilities can still run an inclusive 2017 Election. Third, the success of Pemilukada in Bengkala village was established in livelihood.

Keywords: *BengkalaVillage, Disability, Election, Fulfillment of Political Rights.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilih penyandang disabilitas, semenjak diadakannya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Asas LUBER JURDIL) mulai diprioritaskan sejak tahun 2004 hingga pemilihan terakhir pada tahun 2017. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum 2017 (data terbaru saat ini) terlihat banyak sekali masalah yang didapat pada penyandang disabilitas, baik saat melakukan pemilihan atau memberikan hak suara, pada

saat proses kampanye, dan bahkan pada saat setelah memberikan hak suaranya. Banyak penyandang disabilitas yang merasa tidak terpenuhi hak-haknya dalam melaksanakan proses pemilihan atau pemberian hak suara.

Masalah pemenuhan hak politik kepada kaum disabilitas juga terjadi pada masalah alat kelengkapan, lokasi dan jenis Tempat Pemungutan Suara yang belum ramah bagi penyandang disabilitas. Sehingga banyak dari mereka (penyandang disabilitas) enggan untuk memberikan suaranya karena sarana dan prasarannya tidak memenuhi

berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Contohnya yang terjadi di Provinsi Jawa Timur banyak sekali penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT tidak melakukan pemilihan, Provinsi Bali, terutama di Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli dan Karangasem. Banyak penyandang disabilitas yang telah terdaftar dalam DPT tidak melakukan pemberian hak suaranya karena masalah lokasi TPS. Kemudian yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, juga terjadi hal yang sama, dimana pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT tidak melakukan pemberian suara di TPS tempatnya terdaftar.¹ Namun, semua berbanding terbalik dengan yang terjadi di Desa Bengkala.

Desa Bengkala yang terletak di Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu desa yang juga ikut melaksanakan Pilkada Serentak 2017, ternyata memiliki lebih dari 22 Kepala Keluarga (KK) yang menderita Disabilitas bisu, tuli, bisu dan tuli yang dikenal dengan Kolok (penyebutan pada masyarakat Bali).² Beda dengan permasalahan secara nasional yang dialami oleh penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas yang berada di Desa Bengkala ini malah antusias dan penuh semangat untuk mengikuti Pilkada Serentak 2017. Dalam data yang dirilis oleh

¹Komisi Pemilihan Umum, *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017*, Cetakan Pertama Terbitan Pertama, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2017. hlm 309 - 313

²Buleleng Dalam Angka 2016, Profil umum Desa Bengkala, Kabupaten Buleleng yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistika Kabupaten Buleleng. <https://bulelengkab.bps.go.id>

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, didalam daftar pemilih tetap tercatat sebanyak 72 orang yang berasal dari 22 kepala keluarga telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di Kabupaten Buleleng.

Desa Bengkala boleh berbangga diri karena dapat memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas fisik untuk memberikan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2017 Kabupaten Buleleng. Semua penyandang disabilitas sebanyak 72 orang yang telah memiliki hak pilih tercatat telah memberikan hak pilihnya di 5 TPS yang disediakan oleh panitia pelaksana di Desa Bengkala. Dapat diartikan Desa Bengkala berhasil mencetak angka 100% untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas fisik dalam Pilkada Serentak 2017. Dengan kata lain Desa Bengkala telah sukses melaksanakan Pilkada Serentak 2017 yang ramah terhadap penyandang disabilitas fisik. Berbeda dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 secara nasional yang dinilai masih tidak ramah terhadap penyandang disabilitas fisik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada sub-bab sebelumnya. Penulis merumuskan rumusan masalah yang dapat diangkat rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pemenuhan hak politik kaum disabilitas di Desa Bengkala dalam Pemilu Pilkada Kabupaten Buleleng tahun 2017?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang pemenuhan hak politik

kaum disabilitas dan partisipasi kaum disabilitas dalam Pemilihan Umum Serentak 2017 di Desa Bengkala, Kabupaten Buleleng, Bali.

2. KAJIAN PUSTAKA

Beberapa penelitian terkait faktor pemenuhan hak politik kaum disabilitas (terutama dalam hal partisipasi dan pemenuhan partisipasi pemilihan umum) diberbagai daerah di Indonesia telah dikaji oleh beberapa penulis sebelumnya

Pertama, dalam penelitian Andre Hanantia (Skripsi Universitas Telkom: 2017). Dalam penelitiannya yang berjudul "Produksi Film Dokumenter 'Terlupakan'(Film Dokumenter Tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur)". Hasil penelitian dari film yang ditayangkan dan tulisan penelitian penulis (dalam bentuk skripsi) menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan baik secara sosial, ekonomi, dan kebutuhan hak politiknya yang dianggap baik dan terlaksana dengan baik oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Ponorogo, namun dibuktikan oleh penulis bahwa pemenuhan bagi kaum disabilitas masih sangat kurang. dijelaskan faktor – faktor mengapa masih belum terlaksananya pemenuhan kebutuhan bagi penyandang disabilitas baik secara sosial, ekonomi, dan pemenuhan hak politiknya. Dalam film dokumenter dan tulisannya dijelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya pemberian hak-hak bagi kaum disabilitas. Namun, pada penelitian ini yang berbasis pada pendudukan

pembuatan film dan tidak bertujuan untuk meneliti tentang pemenuhan hak disabilitas secara politik langsung. Hanya saja, menampilkan bukti-bukti kurangnya respon pemerintahan daerah dan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintahan daerah kepada pemenuhan hak-hak kaum disabilitas di Desa Sidoharjo, Jawa Timur.

Kedua, dalam penelitian oleh Muji Riskian Halalia (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: 2016). Dalam penelitian yang berjudul "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dengan menggunakan dasar-dasar berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan sebagai sumber data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan, serta dokumentasi terhadap data-data berkaitan sehingga dihasilkan kesimpulan penelitian.

Partisipasi

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good governance*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu "*pars*" yang artinya bagian dan "*capere*" yang artinya mengambil peranan

dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103).

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) dalam Monique Sumampouw (2004: 106-107) adalah:

- a. Cakupan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*).
- c. Transparansi.
- d. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power* atau *Equal Powership*).
- e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*).
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*).
- g. Kerjasama.

Dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) tidak luput pula dihubungkan dengan konsep *livelihood* (konsep pembangunan berkelanjutan). Dalam hal ini Desa Bengkala yang merupakan daerah yang membangun partisipasi pemilu penyandang disabilitas. Perlu dilihat apakah peningkatan partisipasi ini berkembang dan tumbuh berdasarkan DFID beserta konsep *livelihood*. Konsep inilah yang akan

digunakan untuk melihat pembangunan di Desa Bengkala, terutama pembangunan partisipasi (*Development of Participation*) di Desa Bengkala

Rational Choice

Rasional Choice atau pilihan rasional (*rational choice theory*) adalah bahwa ‘ketika dihadapkan pada beberapa jenis tindakan, orang biasanya melakukan apa yang mereka yakini berkemungkinan mempunyai hasil yang terbaik’ (Elster 1998a: 22). Dalam hal ini rasional choice atau pilihan rasional merupakan bagian dari perangkat yang sangat diperlukan oleh pakar Ilmu Politik, karena ada fenomena politik yang penting dan sebagian pula dapat dijelaskan melalui teori. Namun demikian, tidak dapat mengklaim bahwa teori pilihan rasional itu berdiri sendiri. Melainkan membutuhkan perspektif lainnya

Dramaturgi

Teori Dramaturgi dicetuskan oleh Erving Goffman. Dramaturgi adalah salah satu teori sosiologi yang mengkaji tentang tindakan sosial dari individu atau kelompok masyarakat. Tindakan sosial seorang individu atau kelompok masyarakat didasarkan atas motif-motif tertentu. Untuk mengetahui motif-motif tindakan masyarakat, Goffman menciptakan sebuah kerangka pembacaan yang dikenal dengan dramaturgi atau teori panggung. Bagi Goffman, dunia kurang lebih merupakan sebuah panggung daripada realitas yang selama ini dipahami. Panggung atau pentas adalah ruang yang digunakan untuk menampilkan atau memerankan peran-peran tertentu dalam kehidupan. Namun, demikian kehidupan diatas panggung

bukanlah kehidupan sesungguhnya melainkan sebagai imitasi dan replica dari kehidupan diluar panggung (*out form stage*). Panggung identik dengan sandiwara dan kebohongan yang berbalut realitas. Disebut sandiwara, lantaran panggung hanya digunakan sekali dan untuk memainkan peran yang artifisial. Disebut kebohongan berbalut realitas, lantaran panggung adalah realitas yang nyata sekaligus tidak nyata. Nyata lantaran ada dinamika diatas panggung dan tidak nyata lantaran dinamika tersebut hanyalah permainan belaka.

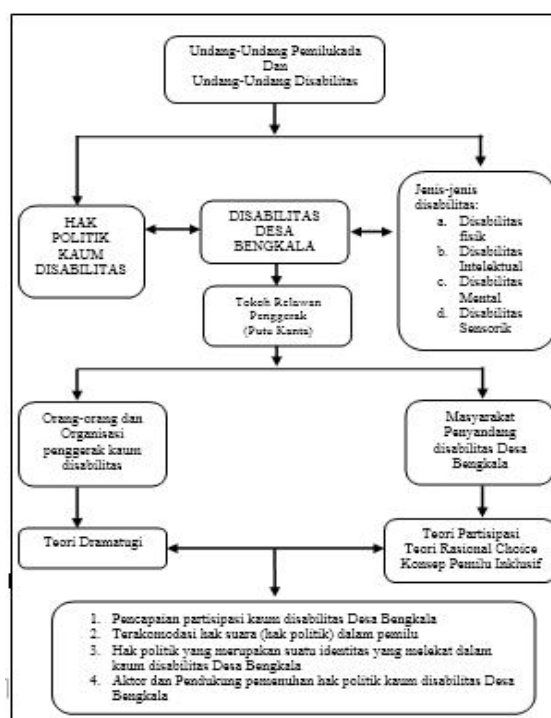
3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitia deskriptif kualitatif, dimana akan menjelaskan fenomena – fenomena yang terjadi di Desa Bengkala. Terutama menjelaskan fenomena Pemilu dan pemenuhan hak politik dalam pemilu bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini akan difokuskan untuk menjelaskan partisipasi dan keunikan-keunikan partisipasi yang ada di Desa Bengkala. Penarikan sample dalam penelitian ini, menggunakan teknik Purposive sampling. Dimana sample telah ditentukan terlebih dahulu dengan catatan bahwa sample yang telah dipilih memiliki pengetahuan yang lebih tentang apa yang akan diteliti.

Kerangka Alur Berpikir

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis akan menguraikan alur atau pola berpikir yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini, adalah alur berpikir yang akan digunakan

oleh penulis. Sebagaimana tertera dalam bagan dan penjelasan ini :



Dalam kerangka alur berpikir ini, penulis mengawali dengan adanya Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang tentang perlindungan hak disabilitas. dimana dalam kedua undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak kaum disabilitas terutama hak politik kaum disabilitas dalam pemilu. Desa Bengkala yang memiliki jumlah penyandang disabilitas diatas rata-rata yang mana memiliki beberapa jenis disabilitas dan hak politik disabilitas yang melekat pada masyarakat disabilitas Desa Bengkala. Keberadaan kaum disabilitas di Desa Bengkala ini, ternyata mampu memberikan pemenuhan hak politiknya dimana mampu mencetak angka 100% pada pilukada 2017 untuk partisipasi disabilitas. Bahkan penyandang disabilitas berpartisipasi menjadi panitia dalam pilukada. Hal ini mencerminkan bahwa kaum disabilitas Desa

Bengkala telah mencapai pencapaian partisipasi politik dalam pemilu, terakomodasinya hak suara, dan menjadikan hak politik sebagai sebagian dari identitas yang melekat pada diri mereka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Bengkala merupakan desa yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng terletak disebelah utara wilayah Pulau Bali. Seluruh wilayah Bali Utara seluruhnya ditetapkan dibawah pemerintahan Kabupaten Buleleng, sehingga Kabupaten Buleleng adalah Kabupaten yang terluas wilayahnya diantara Kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki batas pegunungan yang membujur dari wilayah timur ke barat, sepanjang wilayah pertengahan Provinsi Bali, termasuk dalam wilayahnya Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng adalah wilayah lengkap yang memiliki wilayah gunung, dataran (baik dataran rendah maupun dataran tinggi), dan laut. Kabupaten ini, memiliki komoditas dangan hasil perkebunan yang tinggi. Hasil perkebunannya antara lain buah-buahan seperti jeruk dan anggur, cengkeh, dan tembakau. Desa Bengkala terletak pada jarak 3,8 km dari Kecamatan Kubutambahan. Berjarak 18,6 km dari pusat Kota Singaraja, dan berjarak ±95 ke arah utara dari Ibu Kota Provinsi Bali Kota Denpasar.

Berdasarkan data monografi Desa Bengkala, dapat diketahui jumlah penduduk Desa Bengkala mencapai 2.960 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.464 jiwa (49,46%), dan perempuan sebanyak 1.496

jiwa (50,54%), dengan jumlah KK sebanyak 830 KK dengan luas wilayah 512 Ha, ternyata memiliki lebih dari 22 Kepala Keluarga (KK) dengan luas wilayah 512 Km. Masyarakat Bengkala bermata pencaharian sebagai PNS, ABRI, Pegawai Swasta, Pedagang, dan lain-lain. Tetapi sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.³ Masyarakat Desa Bengkala merupakan satu kesatuan sosial. Mereka mengelompokan tidak saja berdasarkan tempat tinggal atau pemukiman tapi juga atas dasar ikatan hubungan darah.

Kondisi Sosial, Budaya, dan Politik Masyarakat Disabilitas Desa Bengkala

Kondisi politik masyarakat sejatinya berkaitan erat dengan kondisi masyarakatnya. Kondisi masyarakat disabilitas Desa Bengkala saat ini sangatlah harmonis dengan masyarakat lainnya di Desa Bengkala. Bahkan dari segi komunikasi antar masyarakat normal dan masyarakat disabilitas, terutamanya disabilitas tuli-bisu. Uniknya, masyarakat normal di Desa Bengkala berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Meskipun, sebenarnya masyarakat normal di Desa Bengkala fasih dalam berbahasa Indonesia, maupun bahasa Bali.

Kondisi masyarakat disabilitas Desa Bengkala, khususnya disabilitas tuli-bisu ternyata memiliki sikap disiplin dan kejujuran yang sangat tinggi. Masyarakat normal di Desa Bengkala mengakui tingkat kedisiplinan dan kejujuran masyarakat disabilitas tuli-bisu sangat tinggi. Pernah ada sebuah kegiatan desa yaitu rembug desayang dimana

³Data Penduduk Kantor Desa Bengkala. 2018

mengharuskan seluruh masyarakat Desa Bengkala berkumpul tepat pada pukul 7 pagi. Namun, masyarakat disabilitas tuli-bisu telah berkumpul bahkan sebelum waktu yang telah ditentukan. Kedatangan masyarakat disabilitas tuli-bisu ternyata dilakukannya untuk membersihkan area atau lokasi yang akan digunakan sebagai tempat rebug desa. Masyarakat disabilitas Desa Bengkalajuga dikenal sebagai masyarakat yang rajin dan rendah hati dalam membantu menyelesaikan pekerjaan desa. Bahkan masyarakat disabilitas tuli-bisu bersedia mengerjakan pekerjaan desa seperti, ikut menggali makam, menjadi buruh tani, dan membentuk kelompok *pecalang kolok* (pecalang merupakan sebutan polisi adat bali, kalau didaerah lain seperti banyuwangi, Jakarta dan sebagian besar di daerah jawa disebut dengan hansip). Warga disabilitas tuli-bisu membentuk *pecalang kolok*, bertujuan untuk menjaga keamanan desa.

Pekerjaan-pekerjaan desa yang dilakukan oleh masyarakat disabilitas tuli-bisu Desa Bengkala, dilakukan dengan sukarela atau tanpa menerima imbalan atau upah. Namun, sebagai wujud apresiasi dari seluruh masyarakat Desa Bengkala, pihak desa biasanya membebaskan masyarakat disabilitas Desa Bengkala dari beberapa iuran adat dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat disabilitas Desa Bengkala.

Selain memiliki karakter yang baik dan tidak kalah dengan karakter masyarakat normal lainnya yang ada di Desa Bengkala. Masyarakat disabilitas Desa Bengkala juga memiliki prestasi-prestasi yang bahkan sampai dikenal di tingkat lokal, nasional,

maupun internasional. Desa Bengkala menjadi perhatian lokal, nasional, dan bahkan dimacanegara melalui kesenian tradisional tari Bali yang dikenal dengan *Tari Janger Kolok*. Kesenian tradisional tari *Janger Kolok* ini bahkan dijadikan sebagai *mascot* atau simbol Desa Bengkala yang menjadi berlian ditengah kedisabilitasannya masyarakat Desa Bengkala.

Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Desa Bengkala

Kondisi politik masyarakat disabilitas Desa Bengkala mengalami perubahan yang sangat positif dimulai tahun 2007. Tidak hanya kondisi politik masyarakat disabilitas Desa Bengkala, kondisi sosial, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat disabilitas Desa Bengkala benar-benar berubah dan menuju ke arah yang sangat positif. Sebelum tahun 2007 kondisi masyarakat disabilitas Desa Bengkala dapat dikatakan sangat terpuruk, tidak hanya diaspek politik saja seperti pemenuhan hak politik. Aspek pendidikan, sosial, dan ekonomi pun sangat buruk. Bahkan jauh sebelum tahun 2007 kondisi disabilitas di Desa Bengkala dianggap sebagai aib desa. Hal ini dikarenakan jumlah disabilitas di Desa Bengkala yang sangat tinggi.

Tahun 2007 merupakan titik balik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Desa Bengkala. Pada tahun tersebut Desa Bengkala kedatangan seseorang yang sangat peduli dengan kondisi kedisabilitasannya yang ada di Desa Bengkala. Bapak Ketut Kanta sebagai pelopor kepedulian akan disabilitas di Desa Bengkala. Keberadaan Bapak Ketut

Kanta mendorong didirikannya sarana pendidikan bagi disabilitas, yaitu dengan mendirikan sekolah inklusi bersama masyarakat Desa Bengkala lainnya. Pendirian sekolah inklusi ini bertujuan untuk mendidik masyarakat disabilitas Desa Bengkala yang dulunya sama sekali belum menyentuh apa itu pendidikan. Awal mula pendirian sekolah inklusi ini bertujuan hanya untuk mengajarkan masyarakat disabilitas sebatas calistung (membaca, menulis, dan berhitung) dan komunikasi, agar masyarakat disabilitas dapat membaca, menulis, dan berhitung serta mampu bersosialisasi. Namun, semakin berkembangnya mengajarkan hal lainnya bahkan sampai penggunaan teknologi.

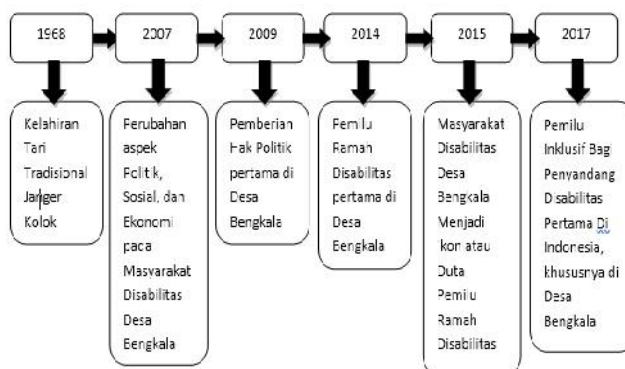
Pemenuhan hak politik mulai diterima oleh masyarakat disabilitas Desa Bengkala diberikan pertama kali tahun 2009. Tepatnya pada saat Pemilu (pemilihan umum) Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pemilu 2009, masyarakat disabilitas pertamakali menerima salah satu hak politik mereka, yaitu memberikan suara mereka dalam Pemilu. Namun, hal ini tidak berjalan dengan lancar. Masyarakat disabilitas Desa Bengkala ini hanya di manfaatkan sebagai ajang promosi untuk memberitahu bahwa akan berlangsungnya Pemilu tahun 2009. Dan mereka tidak menerima dengan baik hak-hak politiknya dalam Pemilu seperti, memberikan suara mereka di TPS dengan baik. Tidak ada fasilitas yang mendukung untuk mengerti akan apa yang dilakukan di dalam TPS, dan tidak adanya sosialisasi kepada mereka tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana, dan memilih siapa dalam berpartisipasi di Pemilu 2009.

Beranjak ke Pemilu 2014, pada tahun 2014 kembali diselenggarakannya Pemilihan umum untuk memilih Legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden. Pemilu tahun 2014 ini, menjadikan patokan pemberian hak pertama bagi kaum disabilitas tidak hanya di Desa Bengkala, tetapi secara nasional. Walaupun memang dilakukan perbaikan secara nasional untuk pemberian hak politik dalam pemilu bagi penyandang disabilitas. Hal ini menjadikan beberapa perubahan terjadi di Desa Bengkala. Terutama pemberian hak politik dalam pemilu bagi penyandang disabilitas di Desa Brngkala. Pemilu 2014 menjadi pencatatan pertama bagi penyandang disabilitas dan pemuktahiran data disabilitas di Desa Bengkala. Masyarakat disabilitas Desa Bengkala. Namun, masih ada masyarakat disabilitas yang belum menerima hak politik dalam pemilunya terpenuhi. Dan bahkan mereka hanya mendapatkan hak memberikan suara saja, tanpa menerima hak lainnya.

Pemilu tahun 2015 yang dapat dikatakan sebagai Pemilukada Serentak pertama kali yang dilakukan di Indonesia. Di Desa Bengkala, tidak melakukan pemilihan, selain karena tidak termasuk wilayah pemilihan daerah, tetapi Desa Bengkala khususnya masyarakat disabilitas Desa Bengkala, tetap merasakan euforia dari berlangsungnya Pemilukada 2015. Hal ini terjadi, dikarenakan masyarakat disabilitas dijadikan sebagai duta sosialisasi pemilukada yang ramah terhadap disabilitas (pemilukada peduli disabilitas). Menjadi duta Pemilukada ramah disabilitas, menjadikan masyarakat disabilitas Desa Bengkala di undang hampir diseluruh sosialisasi yang diadakan oleh KPU.

Dimana mereka menunjukkan paglaran seni, untuk menarik pemilih disabilitas di suatu daerah untuk ikut memilih dan memberikan hak pilihnya. Dari sinilah mereka mengerti akan pentingnya diri mereka dan pentingnya menerima hak politik dalam pemilu.

Titik pemberian hak politik secara keseluruhan kepada masyarakat disabilitas Desa Bengkala terjadi di Pemilukada 2017. Pada Pemilukada 2017. Selama Pemilukada 2017, Desa Bengkala mengalami juga mengalami masa kampanye dan hal-hal yang berbagai politik lainnya. Tidak luput pula masyarakat disabilitas menjadi sasaran untuk mengumpulkan suara yang akan mendukung salah satu calon. Namun, kondisi Pemilukada 2017 bagi masyarakat disabilitas Desa Bengkala menjadi sebuah perubahan yang sangat besar didalam diri mereka. Pada Pemilukada kali ini mereka merasakan benar-benar apa yang namanya menerima hak politik dalam pemilu secara keseluruhan. Bagaimana tidak, angka 100% tercetak dalam sejarah Desa Bengkala sebagai desa yang sukses melaksanakan pemilukada bagi masyarakatnya yang menyandang disabilitas. Tidak hanya itu saja, TPS yang berada di Desa Bengkala seluruhnya adalah TPS inklusif dan ramah disabilitas. Kelima TPS yang berada di Desa Bengkala seluruhnya dikategorikan dalam TPS yang inklusif dan ramah disabilitas bagi penyandang disabilitas. Karena masyarakat disabilitas berperan sebagai pendamping sesama penderita disabilitas (LO), dan juga menjadi petugas keamanan atau pecalang kolok untuk menjaga keamanan di TPS.



Sumber: Diolah dari hasil analisis peneliti

Analisis Temuan

Keberhasilan dan kesuksesan Pemilukada 2017 di Desa Bengkala tidak terjadi begitusaja tanpa adanya sebuah proses dan faktor-faktor yang mendukung keberlangsungan pemenuhan hak politik dalam pemilu bagi penyandang disabilitas di Desa Bengkala. Setelah penulis melakukan penelitian dan observasi secara langsung (turun langsung ke lapangan objek penelitian) di Desa Bengkala, penulis menemukan fakta-fakta yang menjadikan beberapa faktor menjadi faktor penentu yang sangat penting. Pentingnya faktor-faktor ini yang menjadikan Desa Bengkala berhasil dalam memberikan dan memenuhi hak politik dalam pemilu bagi penyandang disabilitas.

Partisipasi masyarakat Desa Bengkala menjadi faktor penting mengapa Desa Bengkala dapat sukses melakukan pemenuhan hak politik dalam pemilu bagi penyandang disabilitas. Partisipasi menjadi salah satu hal yang mendasar dari *good governance*, sehingga menjadi salah satu faktor di Desa Bengkala untuk mewujudkan pemenuhan hak politik dalam pemilu bagi masyarakat disabilitas. Jika dilihat dari model

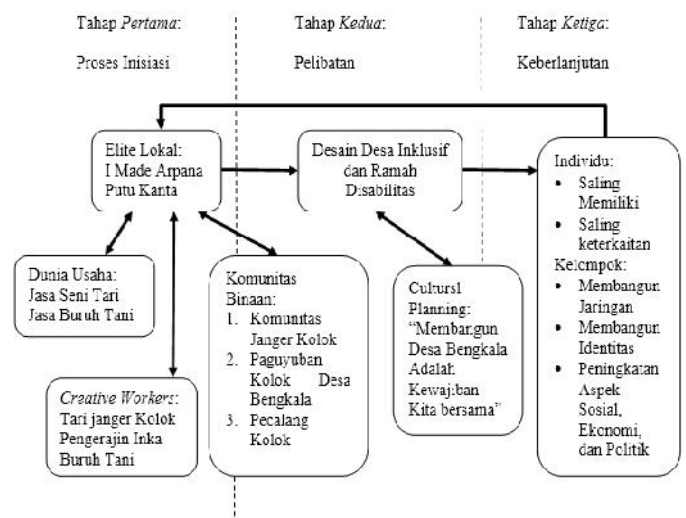
bentuk partisipasi masyarakat disabilitas dan bahkan seluruh masyarakat di Desa Bengkulu berada pada model partisipasi deliberatif. Berdasarkan pengkategorian model partisipasi yang dilakukan oleh Tim IDEA dalam bukunya yang berjudul “*Demokrasi di Tingkat Lokal*”. Menjadikan Desa Bengkulu dalam kategori desa dengan model partisipasi deliberatif.

Desa Bengkulu yang masuk dalam kategori model partisipasi deliberatif karena, memenuhi bentuk-bentuk partisipasi yang ada dalam model partisipasi deliberatif. Bentuk-bentuk partisipasi deliberatif yang ada di Desa Bengkulu antara lain; *pertama*, adanya inisiatif dari masyarakat sebagai bentuk partisipasinya. *Kedua*, adanya bentuk-bentuk konsultasi atau musyawarah dan keterlibatan dalam proses-proses yang ada di Desa Bengkulu, seperti adanya rembug desa dan lain sebagainya. Proses rembug desa yang ada di Desa Bengkulu melibatkan seluruh masyarakat desa, baik masyarakat yang menyandang disabilitas maupun yang masyarakat normal. *Ketiga*, Pengambilan keputusan dan berbagai prosesnya yang ada di Desa Bengkulu ini, mengikutsertakan masyarakat disabilitas sebagai pertimbangan dari berbagai bentuk keputusan yang dibuat di Desa Bengkulu. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut yang ada di Desa Bengkulu inilah, yang menjadikan Desa Bengkulu terkategori sebagai desa dengan model partisipasi deliberatif.

Desa Bengkulu dengan model partisipasi deliberatif, ternyata juga memenuhi prinsip-prinsip partisipasi yang disusun oleh *Departemen for International Development* (DFID) dalam Monique

Sumampouw (2004: 106-107). Prinsip-prinsip partisipasi ini jelas tergambar dalam seluruh kegiatan di Desa Bengkulu, terutama dalam hal kegiatan Pemilu. Hal ini juga menyebabkan partisipasi masyarakat disabilitas juga ikut meningkat.

Faktor-faktor prinsip yang ada di Desa Bengkulu yang didasari dari prinsip – prinsip DFID. Ternyata membentuk pola *livelihood* atau konsep pembangunan berkelanjutan. Pola *livelihood* yang terbentuk di Desa Bengkulu ini, merupakan pola *Livelihood Development of Participation* (Pembangunan Partisipasi Berkelanjutan). Pembangunan partisipasi berkelanjutan ini, dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: Diolah dari hasil analisis peneliti

Melihat *Livelihood Development of Participation* (Pembangunan Partisipasi Berkelanjutan) yang ada di desa Bengkulu. Terlihat konsep *livelihood* seluruhnya telah terpenuhi. Keberadaan elite lokal Desa Bengkulu tentunya telah mendorong pemberdayaan masyarakat disabilitas di Desa Bengkulu. *Creative Workers* yang ada seperti Tari *Janger Kolok*, pengerajin inka, dan *Pecalang Kolok* membuat bertambahnya

jenis dunia usaha yang ada di Desa Bengkala. Dan tentunya, membentuk komunitas binaan yang menambah kesuksesan *Livelihood Development of Participation*. Desain desa inklusif dan ramah disabilitas ternyata didorong oleh salah satu program kerja Desa Bengkala yaitu, “Membangun Desa Bengkala Adalah Kewajiban Kita bersama”. Menjadikan sebuah *cultural planning* untuk dilakukan oleh masyarakat Desa bengkala baik yang normal maupun masyarakat yang menyandang disabilitas. Proses tersebut melengkapitahap terakhir yaitu terbentuknyakarakter masyarakat disabilitas yang memiliki rasa mandiri, saling memiliki, dan keterkaitan, serta membentuk jaringan komunitas diantara sesama penyandang disabilitas.

Motivasi dan Rasionalitas Tinggi Disabilitas Desa Bengkala

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang telah didefinisikan, dikembangkan, dan digunakan oleh banyak peneliti. Sehingga, dapat menjadi acuan untuk menganalisis yang terjadi di Desa Bengkala. Dalam teori pilihan rasional dijelaskan oleh Anthony Downs, dalam David Marsh dan Gerry Stoker, “*Teori dan Metode Dalam: Ilmu Poli*” (2011: 75-79). Pilihan terjadi ketika didalamnya diikutsertakan dengan keputusan-keputusan yang bersifat memuaskan, kepentingan – kepentingan, dan ekonomi. Namun, keputusan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengertian yang ada didalam individu.

Penyandang disabilitas Desa Bengkala memiliki rasionalitas yang sangat

tinggi. Hal ini, dikarenakan sebagian besar kekurangan (kedisabilitasnya) yang diderita bukanlah kekurangan pada bagian otak yang menyebabkan turunnya kemampuan berpikir mereka. Kekurangan fisik yang tidak mengganggu cara berpikir dan tingkat berpikir inilah yang menyebabkan mereka mampu melakukan tindakan yang rasional. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Putu Kanta dalam wawancaranya bersama penulis. Yaitu, sebagai berikut:

“Yang mendukung itu sebenarnya warga Desa Bengkala sendiri ya... 80% sampai 100% warga desa berkomunikasi biasa dengan warga disabilitas ya. Artinya mereka itu tidak tersisihkan dan malahan dia sering walaupun tidak bertemu dengan saya. Mungkin kepada orang lain dia nanya. Kalo dia nanya dia akan memahami. Sepanjang dia memahami otomatis dia bisa. Yang jelas otaknya ini normal, dia cuma dia berkekurangan tidak bisa ngomongsama mendengar saja. Kalo orang-orang C kan beda lagi kayak disabilitas downsyndrom. Ini memang otaknya normal, malahan otaknya bagus-bagus”. (wawancara Putu Kanta, 27 Maret 2018).

Selain hal tersebut tingkat rasionalitas tinggi karena ada dibentuknya sekolah inklusi khusus yang dibangun di Desa Bengkala. Awalnya sekolah inklusi ini hanya berusaha untuk mengajar membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Namun, dari ketiga hal tersebut mereka bisa menggunakan alat telekomunikasi seperti handphone (HP) dan gadget yang digunakan

sebagai sarana komunikasi SMS-an, chatting online (seperti Whatsapps, Line, KakaoTalk, BBM, dan lain sebagainya), dan Vidio Online. Hal ini, menyebabkan semakin mudahnya komunikasi selain menggunakan bahasa isyarat diantara penyandang disabilitas. Bahkan dalam pola komunikasi mereka, terjadi pola interaksi komunikasi berantai. Yang dimaksud pola interaksi komunikasi berantai adalah apabila orang disabilitas mendapatkan sebuah informasi yang diperuntukan untuk mereka. Maka informasi tersebut akan segera dan cepat menyebar dari satu orang disabilitas ke orang yang lain, mereka terhubung bagaikan rantai yang saling memberitahu diantara mereka. Dengan hal ini, informasi yang diterima masyarakat disabilitas semakin banyak, serta pilihan mereka menjadi beraneka ragam.

Penerimaan informasi yang tinggi dan pendidikan yang diterima. Menyebabkan mereka mampu memilih mana yang menurut mereka baik dan yang mana menurut mereka yang buruk. Bahkan mereka mengerti apa itu kecurangan dalam pemilu. Seperti salah satunya adalah politik uang atau *money politics*. Masyarakat disabilitas mengerti dengan baik apa itu politik uang. Memahami hal buruk apa yang mereka terima jika menerima politik uang tersebut.

Kontestasi Panggung Politik Dilihat Dari Aktifitas Penyandang Disabilitas Desa Bengkala

Keberhasilan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tak luput dari pembicaraan positif maupun negatif. Berdasarkan teori panggung politik

(dramaturgi) yang dicetuskan oleh Erving Goffman, dalam buku Abd. Halim yang berjudul "*Politik Lokal: Pola, Aktor, dan Alur Dramatikanya*". Dalam teorinya Goffman menyebutkan bahwa segala sesuatu individu atau kelompok mempunyai banyak motif untuk mengontrol kesan – kesan dari sebuah situasi. Sehingga Goffman menyimpulkan ada duapanggung teatrikal politik. Panggung *pertama*, yang disebut dengan *front stage* (panggung depan) yang berisi hal-hal yang positif yang tampak didepan. Dan panggung *kedua*, yang disebut dengan *back stage* (panggung belakang) yang berisi hal-hal negative yang bersembunyi di balik kesuksesan atau hal positif yang ada di *front stage*.

Masyarakat disabilitas Desa Bengkala menunjukkan kesuksesan bahwa kelompok mereka telah dipenuhi hak-hak politiknya dalam pemilu. Mereka masyarakat disabilitas diberdayakan secara positif dan produktif. Dengan adanya *Janger Kolok* dan *Pecalang Kolok*, semakin menunjukkan bahwa panggung depan selama proses menuju pemenuhan hak politik dalam pemilu bagi penyandang disabilitas kesuksesan. Proses pemberian hak suaranya terlihat dari prosesnya yang sangat baik. Dari mereka menerima sosialisasi, simulasi, dan sampai pemberian hak suara mereka melakukannya dengan sangat baik. Bahkan hak mereka untuk disetarakan, diperlakukan dengan sama, dari aspek sosial, ekonomi, dan politik pun diterima dengan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang telah ditampilkan pada sub-bab sebelumnya. Tidak hanya itu saja, bukti dokumentasi pun mendukung hal ini.

Back stage yang terjadi di Desa Bengkala ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di *front stage* konstestasi panggung di Desa Bengkala. Dibelakang panggung (*back stage*) masyarakat disabilitas Desa Bengkalamenerima perlakuan yang sama seperti yang terjadi di *front stage*. Bahkan kelompok penyandang disabilitas ini, menerima sama setiap harinya. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak I Wayang Juliarta yang merupakan salah satu masyarakat penyandang disabilitas Desa Bengkala, yaitu sebagai berikut:

“Masyarakat desa semuanya sangat baik. Mereka mengerti akan kekurangan yang saya miliki. Saya bangga tinggal disini karena saya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, seperti berbicara bersama mereka, tinggal dan bekerja seperti mereka, bisa ikut dalam kegiatan yang ada di desa. Kemarin saya ikut mencoblos pemilihan Bupati Buleleng. Saya memilih di TPS 5, dan saya memilih no *****. Saya senang bisa memilih karena ini pertamakali saya ikut...” (Wawancara I Wayan Juliarta, tanggal 27 Maret 2018).

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa apa yang diterima oleh masyarakat baik pada posisi *front stage* dan *back stage* adalah sama. Tanpa ada hal yang dikurang-kurangi yang terjadi pada posisi *back stage*. Hal ini, mematahkan teori panggung politik Goffman yang mana akan adanya perbedaan yang sangat signifikan atau berbeda 180 derajat antara *front stage* dan *back stage*. Di Desa Bengkala keberadaan panggung *front stage* dan *back stage* adalah hal yang sama. Jika melihat *front stage* di Desa bengkala, maka akan terlihat secara langsung *back stagenya*. Apa

yang dilihat di *back stage* itulah yang terlihat di *front stage*.

5. KESIMPULAN

Desa Bengkala, Kabupaten Buleleng, Bali. Didesa ini penyandang disabilitas dapat dengan baik menyalurkan hak politiknya dalam Pilkada Serentak 2017. Dimana tingkat keikutsertaan pesta demokrasi penyandang disabilitas fisik mencapai angka 100% . Bahkan terdapat juga panitia yang menyandang disabilitas yang berpartisipasi. Hal ini terjadi karena terdapat keunikan tersendiri yang ada didesa tersebut yang patut dicontoh daerah lain untuk meningkatkan partisipasi dan pemenuhan hak politik kaum disabilitas.

Terdapat dua faktor keberhasilan yang dimiliki Desa Bengkala dalam mencapai kesuksesan untuk memenuhi hak politik bagi kaum disabilitas. Pertama adalah faktor partisipasi dari partisipasi masyarakat desa baik yang normal maupun masyarakat yang menyandang disabilitas. Kedua, adalah faktor tingkat rasionalitas yang dimiliki oleh penyandang disabilitas Desa Bengkala.

Kemandirian, kesetaraan, dan rasa memiliki yang ada di Desa Bengkala adalah murni yang terjadi. Tidak ada yang ditutup – tutupi dalam hal memberikan hak-hak bagi masyarakat disabilitas di Desa Bengkala. Jika dilihat lebih dalam jika melihat teori dramaturgi untuk melihat Desa Bengkala, maka teori tersebut tidak berlaku lagi dalam hal kehidupan berpolitik masyarakat Desa Bengkala.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

A-WEB. (2017). *Charter of the Association of World Election Bodies*. August 31, 2017. Song-do, Republic Of Korea: Association of World Election Bodies.

Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Kabupaten Buleleng 2016*. Buleleng: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng.

Bagir, Manan. (2001). *Perkembangan Pemikiran dan Pengetahuan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni Bandung.

Daming, S. (2011). *Marginalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas HAM RI.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.

Komnas HAM RI. (2011). *Marginalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas HAM RI.

Susanti, Bivitri. (2016). *Hak Memilih Untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan.

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Australia Indonesia Partnership for Justice. (2014). *Human Right Advocacy For Community Based Organitations of Person With Disabilitises*. Jakarta:

Australia Indonesia Partnership for Justice

Goffman, Erving. (1956). *The Presentation Of Self In Everyday Life*. Jurnal. Volume I. Social Science Research Center University of Edinburgh. Skotlandia: University of Edinburgh.

Halalia, Mugi Riskiana. (2016). *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*. Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Hanantia, Andrea. (2017). *Produksi Film “Terlupakan” (Film Dokumenter Penyandang Disabilitas di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur)*. Skripsi Program Sarjana Universitas Telkom. Bandung: Universitas Telkom

Mastini, Komang. (2017). *Faktor TingginyaPartisipasi Politik masyarakat Desa Sidetapa Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014*. Skripsi Program Sarjana Universitas Udayana. Denpasar: Universitas Udayana.

Wigati, S. & Fikrianto, A. R. (2013). *Pendekatan Sustainable Livelihood Framework Dalam Rangka Membongkar Dominasi Tengkulak*

Melalui Kegiatan Keagamaan: Studi Kasus Pada Pendampingan Kuliah Kerja Nyata PAR 2012 di Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun. Jurnal Dakwah. Volume XIV No.2. IAIN Sunan Ampel. Surabaya.

Yuhanda, Ferry. (2016). *Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Disabilitas dalam Pemilu 2015.* Skripsi Program Sarjana Universitas Muhamddiyah. Surakarta: Universitas Muhamaddiyah Surakarta.

Sumber Internet:

Badan Pusat Statistika Republik Indonesia. (2016). *Profil Umum Desa Bengkala Kabupaten Buleleng.* Buleleng Dalam Angka 2016. <https://bulelengkab.bps.go.id>.

Buleleng: Badan Pusat Statistik. Diunduh pada tanggal 19 Desember 2017. Pukul 14.39 WITA.

Balipuspanews. (2017). *KPU Buleleng Berikan Pengarahan Warga Kolok.* Bali News Politik. Halaman 1. <http://www.balipuspanews.com/2017/01/kpu-buleleng-berikan-pengarahan-warga-kolok/>. Denpasar: Balipuspanews Diunduh pada tanggal 19 Desember 2017. Pukul 14.45 WITA.

Fakta Daerah. Com. (2017). *Desa Bengkala (Kubutambahan – Buleleng) Provinsi*

Bali dan Fakta Pesona Berlian dibalik Kebisuan.<http://www.faktadaerah.com/2017/11/desa-bengkala-kubutambahan-buleleng.html>.

Diunduh pada tanggal 18 Maret 2018. Pukul 23.02 WITA.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng. (2017). *KPU Provinsi Bali Gunakan Media Video Dalam Sosialisasi dengan Penyandang Tunarungu Desa Bengkala.* News. Halaman 1. <http://kpu-bulelengkab.go.id/index.php/baca-berita/63/baca-berita/171/baca-berita/178/KPU-Buleleng-Sosialisasikan-Tahapan-Pemutakhiran-dan-Penyusunan-Daftar-Pemilih-Pilkada-Buleleng-2017>. Buleleng: Komisi Pemilihan Umum. Diunduh pada tanggal 19 Desember 2017. Pukul 17.55 WITA.

Sumber Lain

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Desa Bengkala

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali